

# MEMBANGUN PERGURUAN TINGGI UNGGULAN PLUS (Sebuah Rekayasa Aneksasi Antara PT dan Pesantren dengan Dukungan Modal Asing)\*)

Oleh:

**Wahjoetomo & A. Khudori Soleh \*\*)**

## A. ABSTRAK

Dalam dunia pendidikan di negeri ini, sebenarnya ada dua buah lembaga yang sangat potensial; Pesantren (dari sisi pendidikan agama) dan Perguruan Tinggi (dari sisi pendidikan umum). Masing-masing mempunyai kelebihan-kelebihan, di samping kekurangan. Pesantren unggul dalam pembinaan watak keimanan dan ketaqwaan (Imtaq), tapi tertinggal dalam soal Iptek. Sedang Perguruan Tinggi maju dalam masalah Iptek, tapi lemah dalam pembinaan moral.

Untuk mempersiapkan SDM handal di masa yang akan datang; manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berpengetahuan tinggi, terampil dan sebagainya, kelebihan-kelebihan dari kedua lembaga tersebut dicoba untuk bisa dipadukan menjadi sebuah

sistem pendidikan tersendiri yang utuh, unik dan unggul. Lebih-lebih ditambah dengan dukungan modal asing.

Kata kunci; pesantren, perguruan tinggi dan perguruan tinggi unggulan plus.

## B. IFTITAH

Di tengah gencarnya ide untuk membangun sekolah unggulan saat ini, perlu dipikirkan bagaimana membangun perguruan tinggi yang juga 'berstatus' unggulan. Ini penting, sebab perguruan tinggi adalah puncak sekaligus 'titik' akhir dari 'pembibitan' seseorang yang akhirnya akan tampil sebagai pemimpin masyarakat.

Selama ini, terus terang, lembaga pendidikan tinggi kita masih belum mampu memenuhi tuntutan pendidikan nasional

\*) Gagasan lebih luas tentang masalah ini, diterbitkan dalam bentuk buku oleh "Gema Insani Press" (GIP), Jakarta, dengan judul "PERGURUAN TINGGI PESANTREN".

\*\*\*) H. Wahjoetomo mantan Rektor Unmer Malang, dan A. Khudori Soleh dosen agama Islam Unmer Malang.

secara utuh sebagaimana yang diamanatkan GBHN; terciptanya kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berilmu pengetahuan tinggi. Yang ada baru setengah-setengah; unggul dalam Iptek tapi lemah soal moral keagamaan, atau bagus dalam masalah agama, tapi lemah Ipteknya.

Padahal, masyarakat kita — sebenarnya — sangat membutuhkan adanya lembaga pendidikan ideal seperti itu. Yaitu lembaga pendidikan yang mampu memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi maju (Iptek) sekaligus mampu menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan. Hal ini bisa dibuktikan dengan membludaknya calon mahasiswa yang ingin masuk IAIN ketika masih terbuka program tadaris; matematika dan bahasa Inggris. Sebab, di situ mereka bisa mendapat dua keuntungan; menguasai ilmu-ilmu umum (matematika dan bahasa Inggris) dan sekaligus ilmu-ilmu agama.

Tulisan ini bermaksud 'mengangan' tentang sebuah lembaga pendidikan tinggi ideal yang tidak hanya mampu membekali Iptek, tetapi sekaligus juga moral keagamaan. Dan dengan menarik modal asing sebagai pemasok dana, diharapkan Perguruan Tinggi Unggulan (PTU) ini benar-benar unggul dan bahkan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan di luar negeri.

### C. KONDISI PERGURUAN TINGGI

Perguruan tinggi kita saat ini, sebenarnya, telah banyak memberikan andil bagi pembangunan SDM nasional. Telah amat banyak sarjana atau ilmuwan dilahirinya dari sana. Akan tetapi, bila dilihat dari segi kualitas keilmuan dan pembinaan moralnya, masih sangat jauh ketinggalan dan mem-

prihatinkan.

Untuk soal kualitas, kiranya bisa dilihat dari segi relevansinya dengan dunia kerja. Pada tahun 1989, angka partisipasi pendidikan tinggi kita 2,3 %, sedang Malaysia telah mencapai 5,1% dan Taiwan 10,1%. Selanjutnya, pada tahun 1991 ada kenaikan, menjadi 10%. Namun, itu juga belum bisa dibanggakan. Kita masih tetap jauh ketinggalan. Sebab, angka itu telah dicapai Korea pada tahun 1975. Dan sebagai perbandingan, angka partisipasi pendidikan tinggi 38% dicapai Filipina tahun 1985, Thailand 20% tahun 1985, Singapura 12% tahun 1983.

Rendahnya partisipasi pendidikan tinggi kita terhadap dunia kerja ini kemudian memunculkan masalah baru; soal pengangguran yang semakin tahun semakin meningkat. Dalam hasil suatu studi proyeksi yang diadakan ketika mempersiapkan Repelita V yang lalu disimpulkan bahwa apabila dunia pendidikan kita tetap berjalan sebagaimana yang ada sekarang, maka pada akhir Repelita V akan terdapat surplus tamatan pendidikan tinggi sebanyak 614,2 ribu, seterusnya satu juta lebih pada akhir Repelita VI dan 1,7 pada akhir Repelita VII (Tilaar, 1992).

Bahkan, bila dilihat dari poros pendidikan dasar-pendidikan tinggi, ada kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula peluangnya untuk menjadi penganggur. Dan surplus lulusan pendidikan tinggi ini, cenderung semakin berlipat-lipat dari Repelita ke Repelita. Sedang pada pendidikan tingkat lanjutan pertama ke bawah, cenderung kurang adanya tenaga kerja terdidik. Lihat tabel 1.



Tabel 1. **PERKIRAAN JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA SELAMA REPELITA V**

Pendidikan	1988	1993	Tambahan 1988-1993	% Kenaikan
1. SD ke bawah	512.668	156.022	(356.646)	-
2. SLTP Umum	267.347	907.458	640.111	340
3. SLTP Kejuruan	29.863	(437.038)	(466.901)	-
4. SLTA Umum	654.786	1.621.193	966.431	148
5. SLTA Kejuruan	364.279	(100.579)	(464.858)	-
6. Universitas	132.590	444.309	311.719	335
Jumlah	1.961.533	3.128.982	1.918.261	

Sumber: H.A.R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional, hal 152.

Adapun tentang lemahnya pembinaan moral keagamaan di perguruan tinggi, bisa dibuktikan dengan banyaknya penyelewengan, kolusi, korupsi—yang menurut Sumitro sampai mencapai 30% dari dana pembangunan— yang dilakukan oleh “orang-orang besar” yang notabene pernah dididik di lembaga perguruan tinggi. Juga bisa dilihat dari seringnya muncul kasus kumpul kebo, maraknya budaya sontek-menyontek ketika ulangan, menjiplak skripsi, jual-beli nilai atau yang lain yang tidak sesuai dengan moral akademis dan moral agama.

Dari situ, apa yang dinamakan nilai-nilai keikhlasan dalam menuntut ilmu akhirnya juga menjadi terasa hambar. Menguap. Kegiatan kuliah tidak lagi didasarkan pada niat yang murni untuk meningkatkan kualitas dan potensi diri sebagai aktualisasi ibadah, tapi bergeser ke arah tujuan-tujuan lain yang lebih pralmatis dan duniawi. Akibatnya, mereka masuk kuliah bukan untuk mencari ilmu, tetapi hanya mengejar nilai formalitas; angka-angka atau selebar ijazah, yang cara mendapatkannya bisa dengan jalan pintas sebagaimana yang banyak terjadi dalam kasus pendidikan kita.

Di sini, perguruan tinggi telah berubah menjadi “lembaga bisnis”, bukan lagi seba-

gai lembaga mulia yang berfungsi sebagai pentransfer nilai dan penggodokan moral.

#### D. LEMBAGA PESANTREN

Sementara itu, dunia pesantren, yang dinilai banyak kalangan sebagai lembaga pendidikan nomor tiga—setelah lembaga pendidikan umum dan agama, dari MIN sampai IAIN— ternyata mempunyai banyak kelebihan dalam bidang pembentukan moral, yang itu justru sangat dibutuhkan dalam masa-masa kegersangan rohani seperti saat ini.

Di pondok pesantren, nilai-nilai keikhlasan—yang di dunia perguruan tinggi telah banyak bergeser ke arah materialistik— justru tumbuh dengan subur. Dalam pandangan mereka, belajar mengajar, bukanlah semata-mata demi mengejar prestasi duniawi, tetapi merupakan salah satu dari realisasi ibadah. Mereka demikian tekun dan rajin dalam belajar, demi menggapai ridlo Ilahy. Sedemikian, sehingga tidak dikenal dalam pesantren istilah kolosi nilai antara ustad dengan santri.

Di samping itu, pesantren juga punya nilai lebih dalam soal kemandirian dalam



berwirausaha. Para santri punya gairah yang kuat untuk mandiri. Sehingga, dalam soal pengangguran yang telah mencapai ambang mengkhawatirkan dewasa ini, karena banyaknya sarjana yang tidak mendapat lahan kerja, justru para santri tidak ada yang menganggur. Mereka mau bekerja apa saja, tanpa pilih-pilih, asal halal. Dan dengan modal semangatnya tersebut, kita lihat, akhirnya banyak santri yang tidak hanya mampu menciptakan lapangan kerja yang baik untuk diri dan keluarganya, tetapi juga masyarakat lain.

#### E. PENYEBAB RENDAHNYA MUTU DAN MORAL DI PT

Rendahnya mutu perguruan tinggi kita sehingga selalu tertinggal oleh perguruan-perguruan tinggi negara-negara jiran, pada dasarnya adalah dikarenakan minimnya dana pendidikan yang diberikan pemerintah. Tahun 1994/1995, dunia pendidikan di Indonesia hanya mendapat jatah 3,9% dari APBN (JP, 7/01/94) dan pada tahun ini bahkan lebih minim; 4,3%. Sedang di Malaysia, Korea Selatan, dan Filipina, lembaga pendidikan mendapat alokasi dana sebesar 30% dari APBN (Studwick, 1991). Dalam tabel 2, kita bisa menyaksikan perbandingan antara dana pendidikan di Indonesia dengan

yang ada di negara-negara ASEAN.

Kondisi seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan. Apalagi dalam memasuki era global dan pasar bebas nanti, dimana persaingan semakin tajam dan kualitas produk; termasuk produk perguruan tinggi semakin menjadi tuntutan, maka mau tidak mau lembaga perguruan tinggi kita juga harus mau dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga di luar negeri, minimal tidak kalah dengan lembaga pendidikan yang ada di negara-negara tetangga. Tanpa itu, atau kalau pendidikan kita tetap berjalan sebagaimana yang ada sekarang, maka kita jelas akan semakin tertinggal. Dan untuk bisa meningkatkan mutu, atau agar lembaga pendidikan kita mampu mengejar ketertinggalannya, maka itu berarti perlu ada tambahan dana yang besar untuk pendidikan, minimal empat kali lipat dari yang ada sekarang.

Adapun tentang penyebab lemahnya pembentukan dan pembinaan moral (keagamaan) di perguruan tinggi, rupanya, adalah karena kurikulum pendidikan kita kurang seimbang, antara muatan agama dan pengetahuan umumnya. Di Perguruan Tinggi, kita lihat, untuk mencapai sarjana S1, seseorang harus menempuh sekitar 160 SKS, dan hanya 2 SKS yang berupa pendidikan atau pengetahuan keagamaan. Itu pun sudah —untuk— meliputi pengetahuan

Tabel 2. PERSENTASE BIAYA SEKTOR PENDIDIKAN DARI APBN

BEBERAPA NEGARA TAHUN 1965 - 1996					
Negara	1970	1975	1980	1984	1996
Korea Selatan	21.4	13.9	23.7	—	30
Singapura	11.7	8.6	7.3	9.6	—
Hong Kong	22.8	20.7	14.6	18.7	—
Taiwan	16.5	14.2	15.1	16.3	—
Indonesia	—	13.1	8.9	9.3	4.3
Malaysia	17.7	19.3	14.7	—	30
Filipina	24.4	11.4	9.0	10.4	30
Thailand	16.7	21.0	20.6	—	—



agama yang amat luas; aqidah, syariah dan ahlak. Dalam perbandingan seperti itu, sudah barang tentu akan sulit bagi perguruan tinggi untuk mampu menelurkan sarjana-sarjana yang utuh sebagaimana yang diamanatkan GBHN. Yaitu membentuk manusia pembangunan yang beriman, ber-taqwa dan berilmu pengetahuan. Dan bila kita tengok kembali tujuan pendidikan nasional tersebut, maka kurikulum yang ada di perguruan tinggi saat ini, juga pada lembaga-lembaga di bawahnya, berarti patut ditinjau kembali, khususnya kurikulum lokalnya.

Memang ada perguruan tinggi yang memberikan tambahan pendidikan keagamaan sendiri secara khusus, seperti Universitas Muhammadiyah atau perguruan tinggi lain yang dikelola Al-Maarif, seperti Universitas Islam Malang (Unisma) atau yang lain. Di sana pendidikan agama mencapai 8 SKS. Namun, di sini kita juga masih patut bertanya, apakah itu sudah mencukupi? Mengingat, dalam perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut kurang adanya penekanan soal—pengamalan—keagamaan pada waktu-waktu yang lain.

Bukankah banyak juga sarjana yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang keagamaan, dan mereka dahulu dididik di perguruan tinggi umum? Secara kasuitis, memang tidak dipungkiri adanya kenyataan seperti itu. Saat ini ada—walau tidak banyak—tokoh-tokoh yang mempunyai kemampuan iptek tinggi sekaligus pengetahuan agama yang mendalam dan mereka pada mulanya menempuh pendidikan di perguruan tinggi (bukan di pesantren). Banyak contoh Guru Besar atau Profesor serta Doktor di berbagai bidang keilmuan yang ternyata memiliki kedalaman ilmu agama. Sehingga lantas sering terjadi ada profesor yang sekaligus seorang ustadz atau ustadzah. Banyak ilmuwan yang tampil

sebagai penceramah agama di berbagai tempat.

Namun, hal itu bukan berarti materi pendidikan agama di perguruan tinggi telah mampu menggembleng seorang mahasiswa menjadi ahli dan bermoral agama yang kuat. Sebab, jika ada Guru Besar yang juga seorang ustadz, ternyata hal itu karena adanya gemblengan agama yang demikian intensif dalam keluarga atau lingkungannya. Bukan gemblengan resmi dari kampus. Sebab, secara logika, porsi mata kuliah agama 8 SKS, apalagi yang cuma 2 SKS, akan sulit bahkan mustahil untuk mampu membentuk seorang ilmuwan yang memiliki pengetahuan dan bermoral agama yang kuat.

## F. KONDISI KONDUSIF PESANTREN

Terbentuknya sifat dan sikap yang amat menonjol dalam pribadi para santri sebagaimana yang dijelaskan di depan, adalah karena adanya sistem dan kondisi yang amat bagus dalam pesantren. Selama di pesantren, para santri—secara tidak langsung—telah dilatih untuk mandiri. Di sana mereka biasa memasak atau mencuci pakaiannya sendiri. Mereka juga dibiasakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedemikian, sehingga dari situ akhirnya tumbuh sikap tidak bergantung diri pada orang lain.

Ilmu-ilmu yang diberikan kepada para santri di pesantren, penekanannya adalah soal kemampuan aplikasinya. Yaitu kemampuan santri dalam menterjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam pesantren dikenal dengan istilah ilmu manfaat. Seorang santri akan dibilang berhasil dan memperoleh ilmu manfaat bila mampu mengaplikasikan ilmunya di masyarakat. Dan itu berarti merupakan berkah atau barokah. Sebaliknya, ketidakmampuannya



berarti suatu aib atau ketidakberhasilan. Karena itu, setiap santri mesti berusaha mendayagunakan semua ilmu bila telah ke luar. Dan karena itulah mengapa santri kemudian mempunyai "etos kerja" yang lebih baik daripada lulusan perguruan tinggi; santri lebih bisa diterima (berguna) di masyarakat. Tidak menganggur.

Struktur pengajaran yang unik dan khas seperti ini, akhirnya —tentu saja— menghasilkan pandangan hidup dan visi yang khas pula. Yaitu bahwa visi untuk memperoleh penerimaan di sisi Allah di akherat kelak, yang dalam pesantren dikenal dengan istilah "ihlash", menempati kedudukan utama. Mereka mau dengan tulus menerima apa saja kadar yang diberikan oleh kehidupan, terutama bila dipandang dari sudut kehidupan materiil, asal pandangan ukhrawi bisa terpuaskan. Dari sini akhirnya para santri mampu menciptakan penerimaan perubahan-perubahan status dalam kehidupan dengan mudah. Sedemikian, sehingga para santri lebih bisa adaptif terhadap kemajuan dan lebih fleksibel dalam menempuh jenjang karir kelak. Ini tentu tidak akan bisa didapat dalam lulusan lembaga pendidikan yang lain.

Sistem yang bagus ini masih ditunjang dengan kondisi pesantren yang kondusif. Lingkungan pesantren, minimal terdiri atas asrama santri, kediaman kyai dan masjid atau aula tempat belajar. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan kyai, sebagai pimpinan pesantren, tidak hanya bertindak sebagai guru yang hanya bertugas mengajar untuk memberikan ilmu pengetahuan keagamaan, tetapi sekaligus juga sebagai pembimbing dan teladan bagi kehidupan keagamaan para santrinya. Karena itu, tidak jarang, pada malam-malam buta seorang kyai datang ke bilik para santri, membangunkannya untuk diajak sholat tahajud. Begitu pula ketika menjelang subuh.

Dengan kondisi dan model pengajaran yang demikian, maka metode pengajaran pesantren berarti tidak hanya memakai sistem 7 atau 8 jam, tetapi sistem 24 jam. Sehingga dengan begitu, segala perilaku santri lebih bisa diarahkan, terbimbing dan terkontrol. Dan ini berarti juga salah satu kelebihan pesantren dibanding sistem pendidikan lainnya.

### G.SAINS TINGGI PLUS BERKEPRIBADIAN AGAMIS

Dengan melihat kondisi moral insan-insan Perguruan Tinggi kita yang seperti itu, juga demi memenuhi tuntutan GBHN dan untuk mengejar ketertinggalan kualitas dari lembaga-lembaga pendidikan —minimal— di negara-negara tetangga dalam rangka menyambut pasar bebas tahun 2020 nanti, maka pendidikan nasional kita berarti harus mampu membekali sains dan teknologi tinggi kepada para mahasiswanya, sekaligus mampu menanamkan moral keagamaan yang mendalam.

Untuk merealisasikan gagasan yang begitu ideal; mampu membekali sains dan teknologi tinggi sekaligus moral keagamaan yang kuat kepada mahasiswa, dalam jangka waktu yang relatif singkat, jelas bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan mungkin suatu hal yang sangat sulit —kalau tidak boleh dikatakan mustahil. Karena itu, dalam jangka pendek, hal ini bisa kita realisasikan dengan mampu memadukan segi-segi keunggulan perguruan tinggi dengan dimensi-dimensi positif pesantren, dalam satu sistem pendidikan yang utuh dan terpadu.

Harus diakui bahwa bagaimanapun, —walau mutunya masih kalah bersaing, bahkan tertinggal jauh dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di luar negeri—



Perguruan Tinggi kita masih dikenal memiliki keunggulan dalam bidang penguasaan Iptek. Perguruan Tinggi masih tetap 'unggul' dalam masalah-masalah 'keilmuan', dibanding lembaga pendidikan yang lain. Karena itu, hal-hal yang baik ini bisa kita ambil untuk dipadukan dengan nilai-nilai positif pesantren.

Walau demikian, hal itu bukan berarti lantas Perguruan Tinggi tersebut akan berubah bentuk menjadi "Pesantren Ali" (Pesantren Tinggi) atau IAIN yang bertujuan untuk menciptakan sarjana-sarjana ahli agama. PT yang menggabungkan kelebihan pesantren dan sains PT ini —lebih mudahnya kita katakan sebagai "Perguruan Tinggi Unggulan Plus (PTUP)"— bukanlah 'tindak lanjut' dari IAIN dan tidak akan sama dengan IAIN atau "ma'had Ali". PTUP bertujuan menelorkan sarjana yang unggul dalam Iptek sekaligus berkepribadian agamis. Dalam soal agama, masalah perilaku atau ahlak inilah yang dititik tekankan, walau ilmu agama juga diberikan dan penting. Karena itu, dalam kurikulum PTUP ini nantinya, tidak semata-mata dengan menambahkan materi-materi agama dalam jumlah besar, dengan perbandingan 50-50 misalnya. Tidak. Materi agama bahkan bisa hanya sekitar 30 SKS saja. 100 SKS lainnya tetap dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum, dengan ditambah masalah kewiraswastaan dan kemandirian.

Lalu bagaimana dengan model kurikulum seperti itu PTUP mampu membentuk sarjana yang berperilaku agamis? Perilaku manusia sangat dipengaruhi lingkungannya. Karena itu, untuk menciptakan sarjana yang punya kepribadian santri (sarjana yang sujana), maka para mahasiswa PTUP ini —akan— dididik dalam lingkungan "pesantren". Kasarnya, mereka diasramakan. Sehingga, dengan demikian, pembinaan mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan

dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Begitu pula aktivitas ekstra kurikulernya.

Namun, model asrama yang dimaksudkan di sini bukanlah sekedar asrama sebagaimana yang sering kita jumpai di kota-kota, atau di instansi-instansi tertentu. Sistem asrama atau pemondokan bagi segenap mahasiswa PTUP harus diupayakan sedemikian rupa sehingga mampu meniru dan menumbuhkan "dimensi positif" pesantren; baik dari segi kegiatan ataupun pembinaannya. Misalnya dalam soal kegiatan sholat jamaah sehari-harinya, tahajut atau yang lain. Sedemikian, sehingga dari sana bisa tumbuh rasa keikhlasan, hubungan yang harmonis antara santri (mahasiswa) dengan kyai (dosen), antara mahasiswa dengan mahasiswa, juga kemandirian.

Sebagai gambaran yang mendekati gagasan ini, adalah seperti yang terjadi di Universitas "Darul Ulum" Jombang, Jawa Timur. Di sana, para mahasiswa mempelajari Iptek di kampus, selanjutnya mendalami dan menjalani pembinaan agamanya di pesantren. Hanya saja, di Universitas "Darul Ulum" (Undar) tersebut, rupanya tidak dalam satu sistem dengan pondoknya. Pimpinannya berbeda, sehingga kadang —bisa— juga berbeda kebijakan yang diambil di antara keduanya. Selain itu, tidak semua mahasiswanya bertempat di pondok. Sedang dalam Perguruan Tinggi Unggulan Plus (PTUP), semua mahasiswa harus bertempat di pesantren. Dan dua lembaga tersebut harus ada dalam satu sistem yang tidak terpisahkan. Keduanya ada di bawah satu pimpinan; di bawah rektor misalnya, sehingga kegiatan dan keberadaannya bisa saling menunjang.

Di lingkungan Perguruan Tinggi di Malang, Universitas Islam Malang (Unisma) rupanya juga sudah mulai merintis model perguruan tinggi seperti ini. Unisma sudah



mulai membangun sebuah pesantren, yang mana pesantren ini dikelola oleh kampus, dan para mahasiswa yang bakal menjadi santri pesantren ini adalah mereka yang berasal dari latar pendidikan agama minim dan ditekankan dari fakultas non agama.

Di Universitas Merdeka (Unmer) sendiri, walau belum mampu membangun pesantren yang mampu mendukung terciptanya sosok pribadi mahasiswa atau sarjana yang beriman dan bertaqwa, akan tetapi sejak beberapa tahun yang lalu telah dilaksanakan program ekstrakurikuler yang diharapkan mampu mengarah kepada tuntutan GBHN tersebut. Untuk mahasiswa yang beragama Islam misalnya, diadakan kegiatan kuliah Dluha, pembinaan baca tulis Al-quran, kuliah Ashar, jamaah Maghrib dan jamaah Jum'at setiap hari Jum'at, di masjid. Kegiatan ini minimal harus diikuti 6 kali dalam satu semester dan dilakukan selama dua semester.

Selain itu, di kelas —selain mata kuliah agama yang ada SKS— juga dilakukan mata kuliah pendalaman agama; semester II dan VII. Materinya ditekankan soal ahlak dalam kehidupan sehari-hari untuk semester II, dan ahlak dalam berumah tangga dan bermasyarakat untuk semester VII. Dan kegiatan ini tidak hanya diberikan kepada para mahasiswa, tetapi juga kepada para dosen, karyawan dan pimpinan. Setiap hari Jum'at, di masing-masing fakultas diadakan Pembinaan Mental (Bintal) untuk para dosen, karyawan sampai pimpinan.

Dengan format seperti itu, Perguruan Tinggi Unggulan Plus (PTUP) kiranya akan tampil dengan sosok yang baru; lembaga pendidikan tinggi yang relatif lebih komplet dibanding lembaga pendidikan lainnya. Dan bila gagasan ini bisa direalisasikan, maka tujuan pembangunan nasional; menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, kiranya akan cepat bisa terwujud.

Karena, dengan modal agama, keimanan dan ketaqwaannya, para insan pembangunan kita tidak mudah untuk melakukan kolosikolosi, korupsi, penyelewengan, sehingga mampu melaksanakan amanat yang telah diberikan rakyat.

Ada tiga ciri pokok dalam Perguruan Tinggi Unggulan Plus ini. Yakni, keunggulan penguasaan Iptek, intensitas kajian ilmu-ilmu agama dengan amalan-amalannya, serta jiwa kemandirian. Dalam Perguruan Tinggi Unggulan Plus ini, mahasiswa harus mampu menguasai iptek. Sehingga, bila telah keluar kelak, mereka tidak akan kalah bersaing dengan alumni perguruan tinggi yang lain. Sedang dalam pengkajian ilmu agama, dilakukan secara intensif dan bertahap. Pertama di bangku kuliah, kemudian dilatih amaliah sehari-harinya di pesantren. Dan yang penting diperhatikan, dalam soal kajian agama ini, bukan lagi masalah bagaimana kita beragama yang dibahas, tetapi sudah pada tingkat mengapa kita beragama. Untuk apa, dan lainnya yang bersifat mencari hakekat makna yang terkandung serta pengamalannya. Karena, soal-soal bagaimana kita beragama telah dipelajari sejak tingkat dasar.

## G. BIAYA DARI INVESTOR

Perguruan Tinggi Unggulan Plus (PTUP), karena ia diharapkan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri dalam masalah Iptek dan mampu membekali alumninya dengan kekuatan moral agama yang kokoh, maka dalam realisasinya jelas membutuhkan dana yang sangat besar. Dan ini ternyata juga telah menjadi masalah yang menyebabkan dunia pendidikan kita tertinggal dari lembaga pendidikan di luar negeri. Karena itu, dalam masalah pengelolaan PTUP ini ada gagasan



untuk diserahkan kepada investor; bisa dari dalam negeri maupun luar negeri (investor asing).

Gagasan ini mungkin agak asing bagi kita. Akan tetapi, ini didasarkan pada beberapa alasan yang kiranya bisa diterima (dipertimbangkan). **Pertama**, saat ini kita tidak mungkin mampu menaikkan anggaran dana pendidikan sampai minimal 30% dari APBN, untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara tetangga. Padahal, lembaga pendidikan kita sangat jauh ketinggalan dibanding mereka, karena memang tidak adanya dana yang memadai. Dan kita dituntut untuk segera mengejar ketertinggalan tersebut, di samping pembekalan keimanan, bila tetap ingin eksis dalam era global nanti.

**Kedua**, untuk menghemat biaya dan menjaga moral plus nasionalisme. Bila para pemuda kita sekolah di PTUP (di dalam negeri), karena mutunya yang tidak kalah dengan yang di luar, maka berarti bisa menghemat biaya pendidikan bila dibanding dengan sekolah di sana (di luar). Minimal biaya hidup lebih ringan, di samping rasa nasionalismenya tidak akan luntur dan pembinaan moralnya terjamin.

**Ketiga**, bisa untuk menarik devisa. Bila PTUP ini bermutu karena adanya dana yang besar dari investor, sehingga akhirnya mampu membuka kelas-kelas internasional, maka ini berarti memasukkan devisa bagi negara. Di sini, Australia secara sadar "menjual" jasa pendidikannya ke luar negeri sehingga ribuan mahasiswa luar negeri datang ke sana. Dan Australia sempat meraih devisa ketiga besarnya dari sektor industri jasa pendidikan.

**Keempat**, bisa merangsang perkembangan pendidikan di tanah air. Dengan adanya peran investor sehingga PTUP memiliki mutu dan peralatan yang lebih lengkap di sini, maka mau tak mau, hal itu

akan merangsang lembaga-lembaga pendidikan yang ada untuk lebih meningkatkan kualitasnya, bila mereka tetap ingin eksis. Dan itu berarti akan menciptakan kompetisi yang dinamik di antara lembaga-lembaga pendidikan yang ada di tanah air. Sedemikian, sehingga akan semakin mempercepat terciptanya keberhasilan pendidikan nasional.

Namun demikian, dalam soal pengelolaan PTUP ini, tidak lantas semuanya diserahkan kepada investor (asing). Harus difahami, prinsip pendidikan di luar negeri tidak sama dengan prinsip pendidikan nasional kita. Di Barat, lembaga pendidikan hanya menekankan soal intelektualitas atau IPTEK. Sedang di negara, sebagaimana dijelaskan dalam GBHN 1993, prinsip pendidikan meliputi tiga hal; keunggulan IPTEK, religiusitas atau peningkatan IMTAQ (Iman dan Taqwa) dan nasionalisme.

Karena itu, dalam penanganan PTUP ini nantinya, ada pembagian tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Dan karena salah satu tujuan PTUP adalah membekali mahasiswa dengan kekuatan iman dan moral yang tangguh, maka di antara tiga prinsip pendidikan tersebut, hanya soal Iptek saja yang bisa diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan harapan penguasaan iptek kita akan lebih maju. Sedang dua prinsip lainnya, tetap kita tangani sendiri. Yaitu, pembinaan keimanan dan ketaqwaan termasuk nasionalisme.

Selanjutnya, disadari juga bahwa biaya pendidikan di PTUP ini, karena alasan kualitas dan kelengkapan fasilitas, mungkin agak sedikit mahal. Sehingga, mungkin, agak kurang bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Untuk menghindari kesenjangan dan untuk mengatasi hal ini, maka diatur bahwa 15-25% dari kursi yang ada di PTUP tersebut harus diberikan kepada para



pemuda yang cerdas tapi secara ekonomis kurang mampu. Dengan demikian tidak akan terjadi kesenjangan di bidang pendidikan antara kalangan yang mampu dengan golongan yang kurang mampu.

## H. IHTITAM

Demikian sedikit 'angan-angan' tentang sebuah lembaga pendidikan tinggi unggulan. Sudah barang tentu, konsep ini belum baku. Masih perlu dan mesti didiskusikan lebih dahulu. Akan tetapi, setidaknya ini akan bisa memicu pemikiran para pakar pendidikan, baik pendidikan Islam seperti IAIN, Unisma atau Unmuh, maupun pendidikan umum, untuk menciptakan bagaimana sistem pendidikan nasional yang lebih bagus, berkualitas dan dihargai di masa-masa yang akan datang.

## I. MARAJI

Ahmad Dimiyati, "*Masa Depan Perguruan Tinggi Swasta Islam*", Pelita, Jakarta, 28 September 1991.

Budy Wahyono, "*Krisis Tatakrama dalam Sistem Pendidikan Kita*", Surabaya Post, Surabaya, 7 Agustus 1991.

Dawam Raharjo (Edit). 1985, *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah*, P3M, Jakarta.

HAR. Tilar, 1992, *Manajemen Pendidikan Nasional*, Rajawali Press, Jakarta.

Khudori Soleh. A, "*Saatnya Dibangun Perguruan Tinggi Pesantren*", Pelita, Jakarta, 24 Mei 1996.

———, "*Baru Konsep Awal*", Bhirawa, Malang, 21 Agustus 1996.

———, "*Plus-Minus PT dan Pesantren*", Bhirawa, Malang, 22 Agustus 1996.

Musa Hubeis, "*Menuju Perguruan Tinggi Profesional*", Kompas, Jakarta 19 Oktober 1991.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990, tentang Pendidikan Nasional.

Sarlito Wirawan Sarwono, "*Kehidupan Akademik Seyogyanya Diwarnai Disiplin Yang Ketat*", Suara Pembaruan, Jakarta, 14 Oktober 1991.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wahjoetomo, "*Perguruan Tinggi Pesantren*", Presentasi pada Lokakarya Perguruan Tinggi Pesantren, Institut Pendidikan Darussalam, Pondok Modern Gontor, Ponorogo, 19-20 Juni 1993.